

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ashiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chaerudin, *et.al.*. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Harun, Refly. dkk. 2010. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi , Konstitusi Pers*, Jakarta.

Huda, Ni'matul. 2004. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : UII PRESS.

Kusuma, B. Ananda. 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Pusat Studi HTN UI.

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.

Nurtjahjo, Hendra. 2005 . *Ilmu Negara* .Jakarta: Penerbit Rajawali.

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*.Yogyakarta: Rajawali Pers.

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

-----, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS.

-----, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS.

Soekanto, Soerjono. & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sulaiman, King, Faisal. 2017. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Soetiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta : UII PRESS.

Peter Mahmud Marzuki. 2011.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 54.

### **C. Jurnal, Makalah dan Internet**

Agus Budiono. *“Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan”*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan. 2016

Ahmad Basarah. *“Kajian Teoritis Terhadap auxiliary state’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”*. MMH , Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Ahmad Yani, *“Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. JIKH Vol.12/No.2/Juli 2018.

Bomer Pasaribu, *“Upaya Penataan Kembali State Auxiliary Bodies melalui Peraturan Perundang-Undangan”*, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum *“Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan”* Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.

Bagir Manan. *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah (pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat NASIONAL KASGORO, Cipanas-Cianjur), 26 Juli 2000.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi III. Jakarta: Balai Pusaka. 2005.

Hendra Nurtjahjo. Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*state auxiliary agencies*) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.3 Juli 2005.

Jimly Ashiddiqie. “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Seteah Perubahan Keempat UUD 1945*”, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi tenaga Kerja Indonesia (TKI), NEGARA HUKUM, Vol.7/No.1/2016.

Muchlis Hamdi, “State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.

Neneng Nurhasanah. “*Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*,” MIMBAR, Vol. 29, No. 1/2013.

Raden Imam Al Hafis, “*Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia*,” Jurnal Publika, Vol.3/No.1/2017.

Sri Soemantri, “*Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.

Tjokorda Gde Indraputra & I Nyoman Bagiastra. “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (state auxiliary institutions)*”. Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol 7/No.5/2010.

Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wyiCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+pengawasan&ots=UV7An6ZW4P&sig=M37xIKy4r2MwxxEb44yB2farsXE&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pengawasan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wyiCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+pengawasan&ots=UV7An6ZW4P&sig=M37xIKy4r2MwxxEb44yB2farsXE&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pengawasan&f=false) Diakses 15 Juli 2020 pukul 08.40 WIB. hlm. 14.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/Pengawasan> Diakses 15 Juli 2020 pukul 07.45 WIB

Dewan Pengawas: Revisi UU KPK Cenderung Melemahkan <https://news.detik.com/berita/d-4871020/dewan-pengawas-revisi-uu-kpk-cenderung-melemahkan>.

<https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> 31 Agustus 2015.

Haris Prabowo. 2019. “Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK.” <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X> 2019

Laporan Tahunan KPK Tahun 2018 <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/934-laporan-tahunan-kpk-2018> diakses 12 Juli 2018 Pukul 01.40 WIB

Riyan Setiawan. 2019. “ICW: Dewas KPK Rawan Kepentingan dan Berpotensi Bocorkan Penyadapan.” <https://tirto.id/icw-dewas-kpk-rawan-kepentingan-berpotensi-bocorkan-penyadapan-eict> 2019.

“Kritik Untuk Dewas KPK yang Tak Dibatasi Kode Etik Dalam Undang-Undang,” <https://kumparan.com/kumparannews/kritik-untuk-dewas-kpk-yang-tak-dibatasi-kode-etik-dalam-uu-1sUHOI507gT>. 21 Desember 2019.

Ahmad Nasrudin Yahya, Narasi Positif Dewan Pengawas KPK Dinilai Bisa Jadi Jebakan Batman, Kompas Edisi 21 Desember 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/21/15053771/narasi-positif-dewanpengawas-kpk-dinilai-bisa-jadi-jebakan-batman?page=all>. 2019

Hilda Bunga, KPK Tunggu Izin Dewan Pengawas untuk Geledah Kantor PDIP, Tempo, Edisi 9 Januari 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1293270/kpk-tunggu-izin-dewan-pengawas-untuk-geledah-kantor-pdip>. 2019

Maha Kuasa Dewan Pengawas KPK,” <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/maha-kuasa-dewan-pengawas-kpk/full>. 18 Oktober 2019

Haris Prabowo. DPR Fokus Pembahasan Revisi UU KPK pada Poin SP3 dan Dewan Pengawas. <https://tirto.id/dpr-fokus-pembahasan-revisi-uu-kpk-pada-poin-sp3-dan-dewan-pengawas-eh5h> 2019

Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo September, Edisi 12 Oktober 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polri-berlebihan-tangani-demo-september> 2019

Zunita Putri. *Bamsoet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019*. <https://news.detik.com/berita/d-4707626/bamsoet-targetkan-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr-periode-2014-2019> 2019

Bahas Dewas KPK, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas Ungkit Isu Negatif Seputar KPK. <https://wow.tribunnews.com/2019/12/25/bahas-dewas-kpk-ketua-baleg-dpr-supratman-andi-agtas-ungkit-isu-negatif-seputar-kpk?page=2>. Diakses 10 Juli 2020 Pukul 02.00 WIB

Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Al'Adl, Vol.IX/No.3/Desember 2017, hlm. 3.

KPK, *“Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018,”* 2018, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). 2018